

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

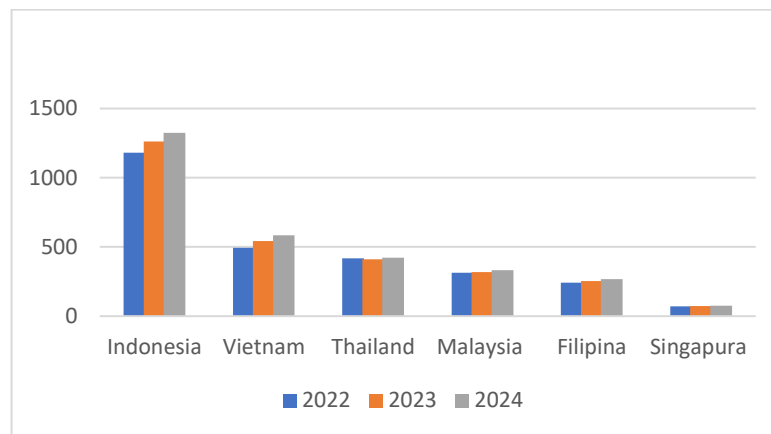
Permasalahan yang sampai masih menjadi tantangan paling krusial di abad ke 21 pada sektor lingkungan adalah perubahan iklim global, dimana penyumbang utamanya adalah emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *World Meteorological Organization* (WMO,2025), pada tahun 2024 bumi mengalami kenaikan suhu mencapai $1,55^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,13^{\circ}\text{C}$) diatas tingkat sebelum adanya industri yang mana hal ini bertentangan dengan Perjanjian Paris yang menetapkan untuk membatasi terjadinya peningkatan suhu maksimal $1,5^{\circ}\text{C}$ di atas tingkat sebelum industrialisasi.

Peningkatan karbon dioksida (CO_2) di atmosfer telah mencapai titik krisis yang mana telah tercatat melampaui 420 ppm pada tahun 2024. Konsentrasi ini merupakan level tertinggi dalam dua juta tahun terakhir dengan selisih sekitar 140 ppm di atas level sebelum era industri yang berada sekitar 280 ppm (Forster et al., 2024; Friedlingstein et al., 2023). Berdasarkan data dari *Carbon Dioxide Information Analysis Centre* (CDIAC), peningkatan emisi CO_2 terjadi sangat cepat yang diperkirakan terdapat 400 miliar metrik ton CO_2 di lapisan atmosfer sejak tahun 1751 ,berasal dari penggunaan bahan bakar non terbarukan dan produksi semen (Amaliyah & Solikhah, 2019).

Asia Tenggara menghadapi peningkatan signifikan menyumbang emisi karbon yang bersumber dari aktivitas industri yang pesat. Gambar 1.1 membuktikan bahwa Indonesia dan Malaysia secara regional menempati posisi sebagai penyumbang emisi karbon terbesar pertama dan keempat di Kawasan ASEAN, dengan total emisi masing masing mencapai 1323.777 MtCO_2e dan 332.166 MtCO_2e yang dipaparkan oleh *Emissions Database for Global Atmospheric Research*) (Crippa et al., 2025). Tingginya angka emisi karbon mencerminkan tingginya aktivitas industrial yang ada pada kedua negara yang mengisyaratkan

terdapat dampak signifikan terhadap lingkungan pada kedua negara tersebut meskipun ada dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. 1 Negara dengan Jumlah Emisi Karbon Terbesar di ASEAN



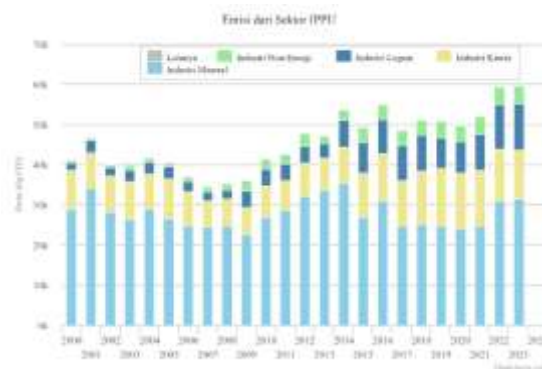
Sumber : JRC/IEA Report, 2025

Berdasarkan data Vietnam Adalah penyumbang karbon terbesar setelah Indonesia, namun penelitian ini berfokus mengkaji secara spesifik terhadap Indonesia dan Malaysia sebagai objek penelitian. Hal ini dipertimbangkan secara strategis, pertama dari segi karakteristik ekonomi Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik yang relatif serupa apabila dibandingkan dengan Vietnam. Dimana kedua negara ini memiliki kesamaan yaitu bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan, kelapa sawit, dan energi berbasis fosil. Selain itu Malaysia juga telah menerapkan NSRF (*National Sustainability Reporting Framework*) yang mengadopsi standar internasional khususnya IFRS sebagai format dalam pelaporan emisi karbon walau masih secara bertahap (Malaysia Securities Commission, 2024). Hal ini membuktikan bahwa Malaysia lebih sistematis dibandingkan Vietnam yang masih pada tahap awal dalam standarisasi dan kedalaman pengungkapan emisi karbon yang tertera pada *Circular No. 96/2020/TT-BTC* sehingga peneliti tertarik membandingkan antara Indonesia dan Malaysia dikarenakan lebih relevan dengan karakteristik kedua negara yang relatif serupa seperti status negara berkembang, struktur pasar modal yang aktif dan tekanan internasional yang meningkat terkait keberlanjutan.

Meskipun tekanan global meningkat, pelaporan emisi karbon di Indonesia dan Malaysia kini masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Kondisi ini berbeda dengan negara maju seperti Australia, yang telah mewajibkan pelaporan emisi karbon melalui pembentukan komite khusus (Kurnia et al., 2020). Akibat langsung dari sifat sukarela ini adalah timbulnya variasi tingkat pengungkapan yang signifikan antar perusahaan, bahkan dalam sektor industri yang serupa. Secara empiris, (Rooschella & Sulfitri, 2023) mencatat bahwa mayoritas perusahaan industri di Indonesia hanya mengungkapkan nilai pengurangan emisi GRK dengan skor minimum pengungkapan sebesar 0,14290 dari tujuh item yang ditetapkan oleh GRI 305.

Sebanyak 47.178 perusahaan yang datanya terdaftar pada Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) telah menghasilkan beban emisi kolektif sebesar 724.012 ton per tahun pada tahun 2025. Tercatat pada tahun 2024 pada Sektor Industri Indonesia menciptakan emisi karbon sejumlah 186,06 MtCO. Berdasarkan Laporan Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hasil perhitungan Emisi untuk Sektor *Industrial Processes and Product Use* (IPPU) tercatat sebesar 59,854 GgCO₂e (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2025). Berdasarkan *Smartsign* KLHK pada Gambar 1.1 juga memperlihatkan peningkatan pengeluaran karbon pada industri di Indonesia. Dengan penyumbang terbesarnya Adalah industri mineral yang menyumbang emisi GRK sebanyak 31,408 GgCO₂e pada tahun 2023.

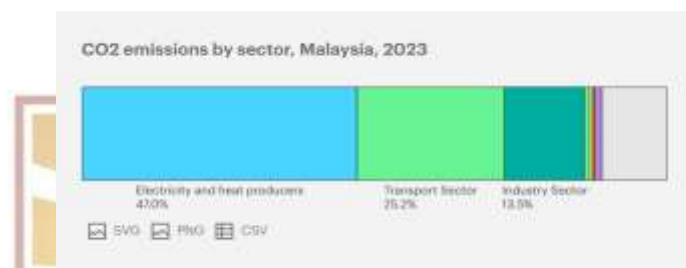
Gambar 1. 2 Emisi GRK di Indonesia Berdasarkan Sektor Industri



Sumber : Smartsign KLHK , 2025

Sementara itu berdasarkan laporan oleh *International Energy Agency* (IEA) pada tahun 2023, hasil perhitungan emisi Malaysia untuk sektor industri menjadi pemegang ke-3 sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di Malaysia yaitu 13,5% atau setara dengan 34.1 MtCO₂e pada tahun 2023 (IEA, 2025) yang terlampir pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 3 Emisi GRK di Malaysia Berdasarkan Sektor



Sumber : IEA , 2025

Variabel *corporate governance* diposisikan sebagai sebuah instrumen yang efektif untuk dapat meningkatkan optimalisasi nilai perusahaan juga dapat menarik antensi serta kepercayaan *stakeholders* (Rooschella & Sulfitri, 2023). Pada penelitian ini memakai dua variabel yaitu institusional dan proporsi dewan komisaris independen. Pemilihan variabel kepemilikan institusional didasari dengan perspektif *stakeholder theory* dimana hubungan antara perusahaan dan para pemegang kepentingan mendorong manajemen untuk melakukan peningkatan transparansi atas seluruh aktivitas operasionalnya. Kehadiran investor institusi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang optimal bagi manajemen serta dapat memberikan tekanan yang lebih optimal pada manajemen terhadap perluasan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial (Akhiroh & Kiswanto, 2016). Selain itu pemilihan variabel kepemilikan institusional didasari oleh karakteristik pasar modal dan struktur kepemilikan yang berbeda antar wilayah. Dimana negara Malaysia memiliki pasar modal yang lebih maju serta partisipasi investor institusional yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, dimana investor institusional besar seperti *Employees Provident Fund* (EPF), Permodalan Nasional Berhard, dan Lembaga Tabung Haji (LTH) menguasai 50 % saham di 10 perusahaan

terbesar Malaysia (Firdhauz et al., 2019). Sehingga tekanan terhadap praktik ESG dan pengungkapan keberlanjutan. Sebaliknya Indonesia memiliki struktur kepemilikan perusahaan didominasi oleh kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga atau grup usaha yang dibuktikan oleh survey yang dilakukan oleh PWC yang menyatakan 95 % dimiliki keluarga dengan 66,9% perusahaan publik menggunakan struktur pengendali utama dipegang oleh keluarga (CNN Indonesia, 2014). Sehingga akan terdapat perbedaan efektivitas pada peran investor institusional dalam memonitoring dan mendorong transparansi lingkungan pada masing-masing negara. Perbedaan karakteristik ini yang menjadikan kepemilikan institusional berperan penting pada penulisan ini.

Pemilihan variabel komisaris independen dipertimbangkan karena jika dilihat dari segi dewan komisaris independen, Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan karakteristik. Dimulai dari sistem, pada perusahaan Indonesia memakai *two tier system* (sistem dua dewan) dimana terjadi pemisahan tegas antara pengawasan dan manajemen hal ini diatur pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sementara itu komisaris independen atau di Malaysia disebut sebagai *independen non-executive directors* (INED) memakai sistem yang berbeda yaitu *one tier system* yaitu pengawasan yang diatur pada *Malaysian Code on Corporate Governance* (MCCG) (*Securities Commission Malaysia* , 2021). Pada *two tier system* di Indonesia dewan direksi bertanggung jawab pada pengelolaan operasional harian perusahaan sedangkan dewan komisaris independen berfokus pada pengawasan dan memberikan nasehat strategis, di mana dengan adanya pemisahan ini terdapat kelebihan yaitu dari segi transparansi dan efektivitas pengawasan, sementara pada *one tier system* di Malaysia memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat serta efisien dikarenakan direksi berwenang atas pengelolaan perusahaan. Keuntungan utama menggunakan sistem ini adalah pengambilan keputusan yang cepat serta fleksibel serta terjadinya integrasi yang lebih baik antara manajemen dan pengawasan.

Regulasi komposisi anggota dewan independen pada negara Malaysia dan Indonesia terdapat perbedaan yang signifikan. Sebagaimana aturan No.33 Tahun

2024 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara eksplisit menata perusahaan publik memiliki minimal 30 % komisaris independen dari keseluruhan komisaris. Sementara itu pada negara Malaysia memiliki regulasi yaitu MCCC menerapkan aturan dengan proporsi yang lebih tinggi dari Indonesia, yaitu sekurang-kurangnya 50% direktur independen dalam *boards of directors* untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar. Walaupun terdapat kesenjangan antara persyaratan regulasi serta perbedaan sistem pada proporsi komisaris independen antara Indonesia dan Malaysia, dapat dinilai bahwasanya masing-masing regulasi dan sistem yang ada di Indonesia dan Malaysia mengindikasikan peran komisaris independen yang kuat dalam masing-masing negara, peneliti dapat memperkirakan komisaris independen dapat memengaruhi komposisi aktual dewan komisaris atau direksi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada efektivitasnya dalam mendorong peningkatan transparansi lingkungan perusahaan.

Peneliti ingin berfokus pada variabel *Corporate Governance* yaitu kepemilikan institusional proporsi komisaris independen dikarenakan masih ditemukannya inkonsistensi pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian oleh Rooschella & Sulfitri (2023) menyimpulkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif pada pengungkapan emisi karbon yang menunjukkan jika *Corporate Governance* baik maka sedikit kemauan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon. Sementara itu penelitian oleh Zandra et al., (2020) memperlihatkan bahwa hasil *Corporate Governance* seperti kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, skala dewan komisaris independen, variasi gender mempengaruhi secara positif pada *carbon emission disclosure*

Penelitian ini berfokus pada industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia (BM) tahun 2022 - 2024. Objek ini dipilih karena berperan aktif sebagai penyumbang karbon terbesar. Berbanding terbalik dengan sektor industri non-karbon seperti sektor jasa keuangan, teknologi dan komunikasi, pendidikan dan layanan profesional lain dengan karbon cenderung rendah, sehingga sangat minim dalam menyumbang dampak pada lingkungan (Suardi & Purwanto, 2015)

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada pendahuluan tersebut, maka muncul pertanyaan yaitu :

- 1) Apakah *corporate governance* yang dinilai berdasarkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh pengungkapan emisi pada Industri dengan membandingkan antara perusahaan yang tercatat di Bursa Indonesia dan Malaysia tahun 2022 – 2024.
- 2) Apakah *corporate governance* yang dinilai berdasarkan rasio komisaris independen berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon di sektor industri dengan membandingkan antara perusahaan yang tercatat di Bursa Indonesia dan Malaysia 2022 – 2024?.
- 3) Apakah ada perbandingan pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik pengungkapan emisi karbon pada industri yang tercatat di Bursa Indonesia dan Malaysia 2022 – 2024?.
- 4) Apakah ada perbandingan pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan emisi karbon pada industri yang tercatat di Bursa Indonesia dan Malaysia 2022-2024?.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Pengaruh *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional pada pengungkapan karbon di perusahaan industri dengan membandingkan antara perusahaan yang tercatat di Bursa Indonesia dan Malaysia tahun 2022 – 2024.
- 2) Pengaruh *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen berpengaruh pada pengungkapan karbon di perusahaan sektor industri dengan membandingkan antara perusahaan yang tercatat di Bursa Indonesia dan Malaysia tahun 2022 – 2024.
- 3) Menganalisis perbandingan pengaruh kepemilikan instusional terhadap pengungkapan emisi karbon pada Perusahaan sektor industri yang tercatat di Bursa Indonesia dan Malaysia 2022 – 2024.

- 4) Menganalisis perbandingan pengaruh komisaris indepen terhadap pengungkapan emisi karbon pada Perusahaan sektor industri yang tercantum di Bursa Indonesia dan Malaysia 2022 – 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, maka penulisan ini diharapkan memberikan dampak berikut :

- 1) **Bagi Perusahaan** : sebagai dasar kedisiplinan pengungkapan emisi karbon
- 2) **Bagi Investor** : digunakan sebagai acuan agar dapat lebih bijak memilih Perusahaan untuk berinvestasi dengan latar belakang pengungkapan emisi karbon yang baik serta transparan
- 3) **Bagi Peneliti Selanjutnya** : sebagai arah dan gambaran untuk penelitian berikutnya

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

- 1) Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Indonesia dan Malaysia periode 2022 - 2024.
- 2) Perusahaan sektor industri yang terdaftar pada Bursa Indonesia dan Malaysia periode 2022 - 2024.
- 3) Perusahaan yang hanya memiliki jumlah kepemilikan saham institusional dan komisi independen pada *annual report* perusahaan.
- 4) Perusahaan dengan pengungkapan karbon dengan indikator GRI

